

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. AIR BERSIH

1. Pengertian Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping (Ketentuan Umum Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990).

2. Persyaratan dalam Penyediaan Air Bersih

Agar air minum tidak mengganggu kesehatan, maka air tersebut haruslah memenuhi persyaratan kesehatan seperti kualitas air bersih harus dapat memenuhi syarat kesehatan yang dimana syarat kesehatan tersebut meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia dan radioaktif (Mulia, 2005:59)

a. Persyaratan Kualitas

1) Mikrobiologis

Paramater Mikrobiologi/ Bakteriologis Parameter mikrobiologi menggunakan bakteri Coliform sebagai organisme petunjuk (indicator organism). Dalam laboratorium, istilah total coliform menunjukkan

bakteri Coliform dari tinja, tanah atau sumber alamiah lainnya. istilah total coliform (Koliform tinja) menunjukkan bakteri coliform yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas lainnya. Penentuan parameter mikrobiologi dimaksudkan untuk mencegah adanya mikroba patogen didalam air minum (Mulia, 2005:62)

2) Parameter fisik

Parameter Fisika/Fisik Parameter fisik umumnya dapat diidentifikasi dari kondisi fisik air tersebut. Parameter fisik meliputi bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna dan zat padat terlarut (TDS), sehingga air bersih yang memenuhi syarat idealnya tidak berbau, harus jernih, tidak berasa dan tidak berwarna. Selain itu juga, air yang baik tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang mencolok dengan udara sekitar (udara ambien). Di Indonesia, suhu air minum idealnya $\pm 30^{\circ}\text{C}$ dari suhu udara Air yang secara mencolok mempunyai suhu di atas atau dibawah suhu udara berarti mengandung zat-zat tertentu (misalnya fenol yang terlarut) atau sedang terjadi proses biokimia yang mengeluarkan atau menyerap energi dalam air.

3) Parameter kimia

Parameter kimia dikelompokkan menjadi kimia anorganik dan organik. Dalam standar air minum di Indonesia zat kimia anorganik dapat berupa logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan beracun serta derajat keasaman (pH). Sedangkan zat kimia organik dapat berupa insektisida dan herbisida, zat kimia organik mudah menguap zat-zat berbahaya dan beracun maupun zat pengikat oksigen. Bahan kimia

organik dalam air minum dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori I adalah bahan kimia yang mudah bersifat carcinogen bagi manusia. Kategori II bahan kimia yang tidak bersifat carcinogen bagi manusia. Kategori III adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit kronis tanpa ada fakta carcinogen (Mulia, 2005: 62)

4) Parameter radioaktif

Adapun bentuk radioaktivitas efeknya adalah sama, yakni menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan dapat berupa kematian dan perubahan komposisi genetik. Kematian sel-sel dapat diganti kembali apabila sel dapat bergenerasi dan apabila tidak seluruh sel mati. Perubahan sel genetik dapat menimbulkan penyakit seperti kanker dan mutasi. Sinar Alpha, Beta dan Gamma dalam kemampuan menembus jaringan tubuh. Sinar Alpha sulit menembus kulit dan Sinar Gamma dapat menembus sangat dalam. Kerusakan yang terjadi ditentukan oleh intensitas serta frekuensi dan luasnya pemaparan (Mulia, 2005: 62).

b. Persyaratan Kuantitas

Persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani. Persyaratan kuantitas juga dapat ditinjau dari standar debit air bersih yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan jumlah kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih masyarakat bervariasi, tergantung pada letak geografis, kebudayaan,

tingkat ekonomi, dan skala perkotaan tempat tinggalnya.

c. Persyaratan Kontinuitas

Air baku untuk air bersih harus dapat diambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Kontinuitas juga dapat diartikan bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari, atau setiap saat diperlukan, kebutuhan air tersedia.

d. Persyaratan Tekanan Air

Konsumen memerlukan sambungan air dengan tekanan yang cukup, dalam arti dapat dilayani dengan jumlah air yang diinginkan setiap saat. Untuk menjaga tekanan akhir pipa di seluruh daerah layanan, pada titik awal distribusi diperlukan tekanan yang lebih tinggi untuk mengatasi kehilangan tekanan karena gesekan, yang tergantung kecepatan aliran, jenis pipa, diameter pipa, dan jarak jalur pipa tersebut. Dalam pendistribusian air, untuk dapat menjangkau seluruh area pelayanan dan untuk memaksimalkan tingkat pelayanan maka hal wajib untuk diperhatikan adalah sisa tekanan air.

Sisa tekanan air tersebut paling rendah adalah 5 mka (meter kolom air) atau 0,5 atm (satu atm = 10 m), dan paling tinggi adalah 22mka (setara dengan gedung 6 lantai). Menurut standar dari DPU, air yang dialirkan ke konsumen melalui pipa transmisi dan pipa distribusi, dirancang untuk dapat melayani konsumen hingga yang terjauh, dengan tekanan air minimum sebesar 10mka atau 1atm. Angka tekanan ini harus dijaga, idealnya merata pada setiap pipa distribusi. Jika tekanan terlalu

tinggi akan menyebabkan pecahnya pipa, serta merusak alat-alat plambing (kloset, urinoir, faucet, lavatory, dll). Tekanan juga dijaga agar tidak terlalu rendah, karena jika tekanan terlalu rendah maka akan menyebabkan terjadinya kontaminasi air selama aliran dalam pipa distribusi.

3. Sumber-Sumber Air Bersih Pamsimas

a. Air Tanah

1) Air Tanah Dangkal

Terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah disini berfungsi sebagai saringan. Di samping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah, setelah menemui rapat air, air akan terkumpul merupakan air tanah dangkal di mana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal.

Hal-hal yang perlu diketahui dalam pembuatan sumur dangkal ini adalah :

- a) Sumur harus diberi tembok rapat air 3,00 m dari muka tanah, agar pengotoran oleh air permukaan dapat dihindari.
- b) Sekeliling sumur harus diberi lantai rapat air selebar 1 – 1,5 m untuk mencegah terjadinya pengotoran dari luar.
- c) Pada lantai (sekeliling) harus diberi saluran pembuangan air kotor,

agar air kotor dapat disalurkan dan tidak akan mengotori sumur ini.

d) Pengambilan air sebaiknya dengan pipa kemudian air dipompa ke luar.

e) 5) Pada bibir sumur, hendaknya diberi tembok pengaman setinggi 1,00 m.

Air tanah dangkal ini dapat pada kedalaman 15,00 m. Sebagai sumur air minum, air tanah dangkal ini ditinjau dari segi kualitas agak baik. Kuantitas kurang cukup dan tergantung pada musim.

2) Air Tanah Dalam

Terdapat setelah lapis rapat air tanah yang pertama. Pengambilan air tanah dalam, tak semuda pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukan pipa kedalamnya sehingga dalam suatu kedalaman (biasanya anatar 100-300 m) akan didapatkan suatu lapis air. Jika tekanan air tanah ini besar, maka air tanah dapat menyerap ke luar dan dalam keadaan ini, sumur ini disebut dengan sumur artesis.

Jika air tak dapat ke luar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu pengeluaran air tanah dalam ini. Pada umumnya lebih baik dari air dangkal, karena penyaringan lebih sempurna dan bebas dari bakteri. Susunan unsur-unsur kimia tergantung pada lapis-lapis tanah yang dilalui. Jika melalui tanah kapur, maka air itu akan menjadi sadah, karena mengandung $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ dan $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$. Jika melalui bantuan granit, maka air itu lunak dan agresif

karena mengandung gas CO_2 dan $\text{Mn}(\text{HCO}_3)$. Untuk mengurangi kadar Fe yang menyebabkan korosi itu harus diadakan pengolahan dengan jalan aerasi yang membrikan kontak dengan udara sebanyak-banyaknya agar Fe (OH_3) dan (OH_4) mengendap dan kemudian disaring. Air sadah tidak ekonomis dalam penggunaannya, karena :

- a) Terlalu boros dalam pemakaian sabun Hal ini disebabkan karena air sudah mengandung Ca^{++} yang jika bereaksi dengan $\text{C}_1\text{7H}_3\text{5COO Na}$ (sabun) akan terjadi endapan $\text{C}_1\text{7H}_3\text{5}(\text{COO}_2)\text{Ca}$ yang menyebabkan tidak terbentuknya busa sabun. Setelah Ca habis, barulah busa akan berbentuk.
- b) Mengandung pada ketel-ketel air karena terjadi reaksi $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 - - \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ Dengan terjadinya endapan CaCO_3 sebagai batu ketel, maka hal ini sangat mengganggu dalam pemindahan panas (ada beda suhu) sehingga sering terjadi ledakan pada ketel-ketel air atau sumbatan pada pipa-pipa. Kualitas pada air tanah pada umumnya mencukupi (tergantung pada lapisan keadaan tanah) dan sedikit pengaruh oleh perubahan musim.

3) Mata air.

Adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas/kualitasnya sama dengan keadaan air dalam.

B. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

1. PAMSIMAS

Program PAMSIMAS merupakan perwujudan dari amanat RPJPN 2005- 2025 dan RPJM 2015-2019 melalui program pembangunan nasional “Akses Universal Air Minum dan Sanitasi tahun 2019”. Target pemerintah tahun 2019 kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS adalah satu program pemerintah untuk dapat menyediakan layanan air bersih dan sanitasi yang layak. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan. Oleh karena itu, program PAMSIMAS dilakukan melalui kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan desa dan komunitas.

PAMSIMAS merupakan program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama sekaligus penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Program PAMSIMAS harus dilandaskan atas partisipasi masyarakat yang tinggi dan pelaksanaannya pun harus terorganisir sehingga tujuan dari program dapat dicapai secara optimal.

Partisipasi masyarakat yang tinggi didorong oleh rasa bahwa mereka sangat membutuhkan air, sedangkan ketersediaan air yang ada tidak mencukupi. Hal ini harus dibangun agar program PAMSIMAS dapat berkelanjutan. Maka kemudian pemerintah perlu memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan dan pengelolaan dari program PAMSIMAS. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dari program PAMSIMAS dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach).

Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat Desa untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah Program Pamsimas mendorong sinergi program air minum dan sanitasi perdesaan melalui berbagai pendanaan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan.

Oleh karena itu pendanaan tidak hanya dari APBD, APBN atau Dana Desa saja melainkan juga ada swadaya dari masyarakat baik itu berupa uang dan juga material yang dibutuhkan. Pamsimas merupakan program yang bersifat hibah atau bantuan, sehingga perlu adanya penanganan pasca program agar hasil pembangunan tidak sia-sia. Untuk menjamin

keberlanjutan program, maka diperlukan adanya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program seperti manfaat, pengelolaan dan cara untuk meningkatkan kepedulian masyarakat untuk terus melaksanakan program. Dengan adanya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap program Pamsimas maka diharapkan program Pamsimas mengalami keberlanjutan.

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat di bidang air minum dan sanitasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target *Universal Access*

2. Tujuan Pamsimas

Tujuan dilaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yaitu untuk:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.
- b. Meningkatnya akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan di wilayah perdesaan.
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- d. Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
- e. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan kelestarian sumber daya

alam sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang

- f. Penguatan dalam kelembagaan pengelolaan PAMSIMAS menjamin keberlanjutan program
- g. Keseluruhan tujuan program PAMSIMAS dapat terwujud dengan partisipasi aktif masyarakat dan peran serta pemerintah untuk mendorong percepatan tujuan program.

3. Landasan Hukum Program PAMSIMAS

Pelaksanaan Program Pamsimas dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015- 2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Beberapa payung hukum utama yang berkaitan dengan pengelolaan Program Pamsimas antara lain:

Tabel 2.1
Landasan Hukum program pamsimas

NO.	LANDASAN HUKUM	TENTANG
1.	UU No. 17 Tahun 2007	RPJPN 2005-2025
2.	UU No. 11 Tahun 2009	Kesejahteraan Sosial
3.	UU No. 17 Tentang 2013	Organisasi Kemasyarakatan
4.	UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
5.	UU No. 6 Tahun 2014	Desa
6.	UU No. 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara
7.	Perpu No. 2 Tahun 2014	Perubahan atas UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah
8.	Perpres No. 5 Tahun 2015	RPJMN Tahun 2015-2019
9.	Perpres No. 185 Tahun 2014	Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
10.	Perpres No. 10 Tahun 2010	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
11.	PP No. 122 Tahun 2015	Sistem Penyediaan Air Minum
12.	PP No. 34 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
13.	PP No. 60 Tahun 2014	Dana Desa yang bersumber dari APBN
14.	PP No. 69 Tahun 2014	Hak Guna Air

15.	PP No. 45 Tahun 2013	Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
16.	Permendagri No. 21/2011	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17.	Permenkes No. 3/2014	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
18.	Permenkeu No. 168/PMK.05/2015	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
19.	Permenkeu No. 143/PMK.02/2015	Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA Kementerian Negara Lembaga dan Pengesahan DIPA
20.	Permenkeu No. 190/PMK.02/2012	Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Berdasarkan Perpres No. 185 Tahun 2014, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.

4. Sasaran Program PAMSIMAS

a. Sasaran Lokasi Program Pamsimas

Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa

sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Secara umum, kriteria desa sasaran Pamsimas meliputi:

- 1) Belum pernah mendapatkan Program Pamsimas
- 2) Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%
- 3) Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%
- 4) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data puskesmas
- 5) Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10% pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APB Desa
- 6) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
- 7) Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang akan fokus menangani bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL)
- 8) Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan

b. Sasaran Penerima Program Pamsimas

Sasaran Penerima Program Pamsimas Adalah Warga Desa/Kelurahan yang belum Mempunyai Akses Terhadap Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak Terutama Kelompok Miskin, dan Masyarakat Terpinggirkan (Indigenous People) atau disebut juga Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil.

5. Organisasi Pengelola PAMSIMAS

Organisasi pelaksanaan program dibentuk disetiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mendukung pelaksanaan program

Pamsimas. Pelaku program Pamsimas di setiap tingkat memiliki tanggung jawab sesuai peran dan fungsinya. Organisasi pengelolaan dan pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan memberikan dukungan langsung bagi pelaksanaan kegiatan Pamsimas di desa dan masyarakat.

a. Pelaksanaan program di tingkat Desa dan masyarakat

Merupakan salah satu pelaku kunci dalam program Pamsimas, meskipun masyarakat-lah yang mengelola dan melaksanakan kegiatan. Pemerintah desa/kelurahan berperan dalam melakukan sosialisasi, fasilitas, mediasi dan koordinasi untuk memperlancarkan pelaksanaan proyek di desa.

b. Fasilitator masyarakat

Merupakan tenaga pendamping yang telah dilatih untuk meningkatkan kapasitas/ kemampuan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatan, mendorong masyarakat untuk mau dan mampu berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil .

c. Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)

Merupakan nama generic organisasi warga yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, sebagai organisasi yang sah menerima dan mengelola BLM Pamsimas. Kriteria anggota KKM ditentukan berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan.

d. BPSPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)

Merupakan lembaga yang pemebentukannya difasilitasi oleh

KKM melalui musyawarah warga masyarakat untuk mengelola pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat desa.

e. Kader AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Merupakan relawan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan ketertarikan untuk pembangunan bidang air minum dan sanitasi di wilayah desa. Kader AMPL desa diharapkan tidak merangkap sebagai pengurus BP-SPAMS.

f. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kecamatan, bertugas dalam

membantu mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan kegiatan Pamsimas di desa/kelurahan di wilayahnya. Tugas ini dilaksanakan oleh kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasi PMD kecamatan bekerjasama dengan sanitarian Puskesmas, Kaurbang Desa/Kelurahan dan pengawas sekolah cabang diknas Kecamatan.

g. Kasi PMD kecamatan bertugas mendampingi Pakem dan melakukan

verifikasi kelayakan Desa sasaran, memberikan bantuan teknis dan pembinaan teknis kepada BPSPAMS, dan bersama-sama dengan fasilitator masyarakat memberikan fasilitas dan mediasi untuk membantu efektivitas kegiatan Pamsimas.

h. Sanitarian (kesehatan lingkungan)

Tenaga sanitarian akan berperan dalam pelaksanaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), termasuk diantaranya pemicu CLTS, pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), dan penerapan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di desa-desa sasaran.

C. Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

1. Pengertian Evaluasi

Dari segi bahasa, kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris “*evaluation*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti evaluasi, penilaian, penaksiran. Sedangkan dari segi istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Edwind Wandat dan Gerald W. Brown yang dikutip oleh Anas Sudjiono, evaluasi menunjuk kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut Hamzah B. Uno, evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders yang dikutip Suharismi Arikunto dan Cipi Safruddin, mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu.

Dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Suharismi arikunto mengutip dari seorang ahli yang sangat terkenal dalam evaluasi program bernama Stufflebeam, mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi sebagai data untuk dianalisis dan diambil kesimpulan sebagai keputusan terakhir dari suatu

kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi memiliki dua kepentingan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan Pamisimas sudah tercapai dengan baik, dan kedua untuk memperbaiki serta mengarahkan pelaksanaan program pelayanan Pamsima. Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Menurut Suharismi Arikunto dan Cipi Safruddin AJ., mendefinisikan program sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan sebagai implementasi kegiatan yang telah direncanakan dan dirumuskan tujuannya. Dimana di dalam program terdapat perencanaan, proses hingga hasil dari tujuan program tersebut. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Menurut Sukardi, evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya, baik terhadap program yang sedang

berjalan, maupun program yang sedang berlalu. Sedangkan Ralph Tyler yang dikutip Suharismi Arikunto, mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan Program Pelayanan yang sudah dapat terealisasi. (Monica,ridwan, waskito : 2019)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan informasi dengan mengamati, menelaah, dan mengukur guna menarik kesimpulan atau mengambil keputusan dalam suatu kegiatan yang telah disusun dan direncanakan tujuannya. Sehingga dalam suatu program dapat terlihat tingkat ketercapaian atau keberhasilan program yang telah dirancang dan dilaksanakan. (Monica,ridwan, waskito : 2019)

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain adalah :

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya suatu program dapat melenceng dari rencana. Sehingga evaluasi bertujuan menentukan posisi pelaksanaan program apakah berada pada treknya atau tidak. Jika terjadi penyimpangan maka dilakukan koreksi.
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasar standar tertentu.

d. Memenuhi ketentuan undang-undang. Suatu program disusun untuk melaksanakan undang-undang tertentu. Suatu program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

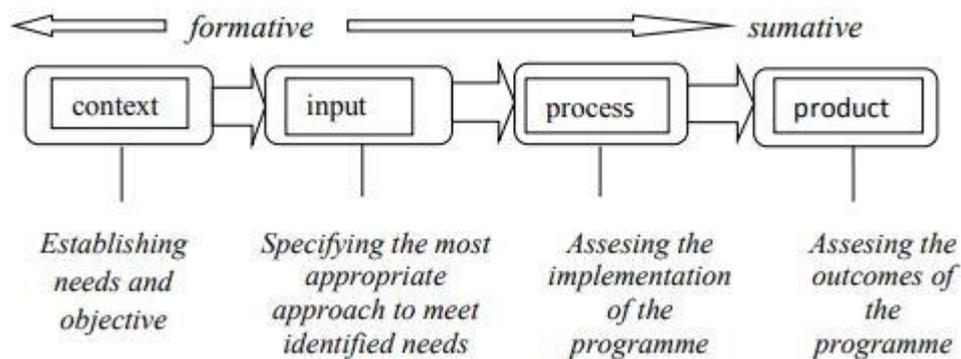
e. Mengambil keputusan mengenai program. Salah satu tujuan evaluasi program adalah untuk mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi program menunjukkan keberhasilan dalam melakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka program akan dilanjutkan. Apabila program kurang bermanfaat, maka harus dihentikan atau diperlukan perubahan. (Wirawan, 2012)

3. Model Evaluasi

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh pakar atau ahli evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya. Model evaluasi CIPP Stufflebeam's model banyak di gunakan untuk mengevaluasi suatu kegiatan.

Model ini mula-mula dikembangkan oleh Stufflebeam dan Guba pada tahun 1968 dalam Kadir, (2008: 36-38). CIPP merupakan kependekan dari context, input, process, and product. Keunikan model ini adlah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (decission) yang menyangkut perencanaan dan operasional sedbuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif/menyeluruh pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan,proses, dan produk. Keempat kata yang merupakan singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari

proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.



Gambar 2.1. CIPP sebagai sebuah sistem

Stufflebeam dalam Kadir, (2008: 40-41) menyatakan bahwa pendekatan yang berorientasi pada pemegang keputusan (a decision oriented evaluation approach structured) untuk menolong administrator dalam membuat keputusan, dimana evaluasi sebagai suatu proses yang menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan dan membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator dengan membagi evaluasi menjadi empat macam yaitu:

a) Context evaluation to serve planning decision,

Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Stufflebeam context input process product Establishing needs and objective Specifying the most appropriate approach to meet identified needs Assesing the implementation of the programme Assesing the outcomes of the programme (1983:128) menyebutkan, tujuan evaluasi konteks yang

utama dalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin (2009:5) menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, tujuan proyek.

b) Input evaluation, structuring decision,

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi input, atau evaluasi masukan. Menurut Eko Putro Widoyoko (2009: 38), evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi :

- 1) Sumber Daya Manusia,
- 2) Sarana dan peralatan pendukung,
- 3) Dana atau anggaran, dan
- 4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

c) Process evaluation to serve implementing decision.

Menurut Worthen & Sanders (1981 : 137) dalam Eko Putro Widoyoko (2009) menjelaskan bahwa evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan :

- 1) Mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi
- 2) Menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

d) Product evaluation, to serve recycling decision,

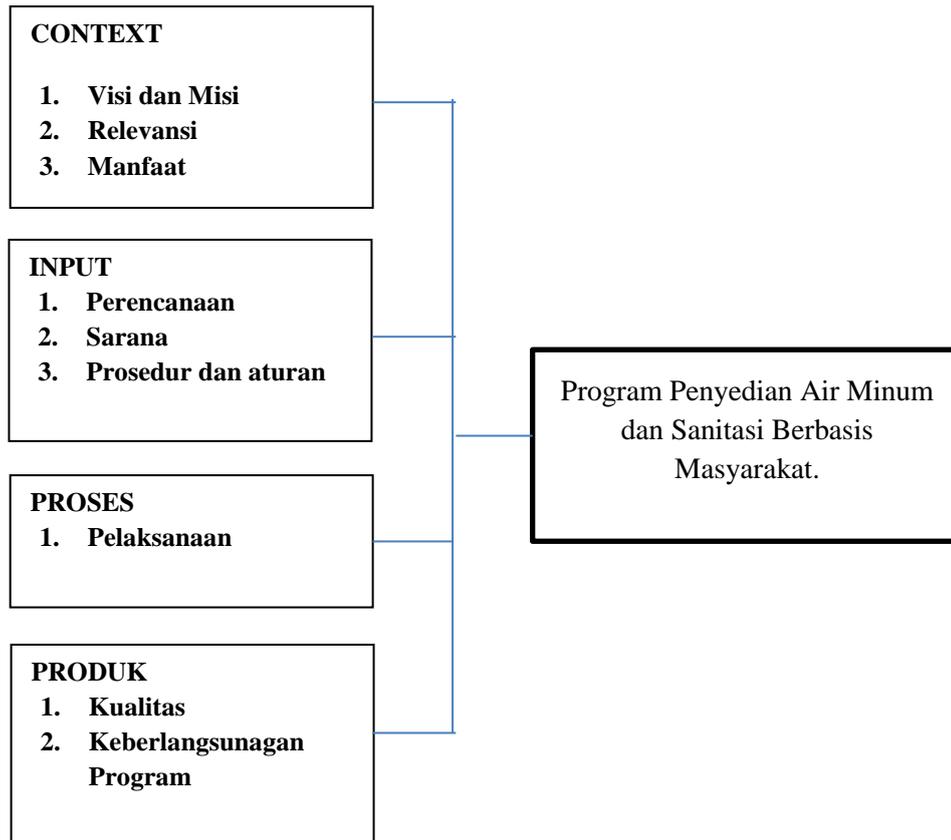
Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan. Sax (1980: 598) dalam Eko Putro Widoyoko (2009) memberikan pengertian evaluasi produk/hasil adalah “to allow to project director (or teacher) to make decision of program. Dari evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau guru untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan akhir, maupun modifikasi program. Sementara menurut Farida

Yusuf Tayibnapi (2000: 14) dalam Eko Putro Widoyoko (2009) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Dari pendapat diatas maka disimpulkan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi atau bahkan dihentikan. Keempat hal tersebut diatas merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan.

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian apabila evaluator sudah menentukan model CIPP akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponennya. Kelebihan evaluasi CIPP menurut Eko Putro Widoyoko (2009: 40) model evaluasi CIPP lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain kelebihan tersebut di satu sisi model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran dikelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak adanya modifikasi.

E. Kerangka Teori

EVALUASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) :



Gambar 2.2
Kerangka Teori

Sumber: Model Evaluasi CIPP *Stufflebeam's*
Cepi Safrudin, Eko Putro Widoyoko, Suharsimi Arikunto 2009

